
Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis (MBG): Yang Bayar Warga, Yang Dapat Gizi Siapa?!

Indonesia Corruption Watch
Jakarta, 6 Maret 2025

Overview

Program Makan Bergizi Gratis

adalah program yang dikampanyekan Prabowo sejak kampanye Pilpres.

MBG adalah Bansos

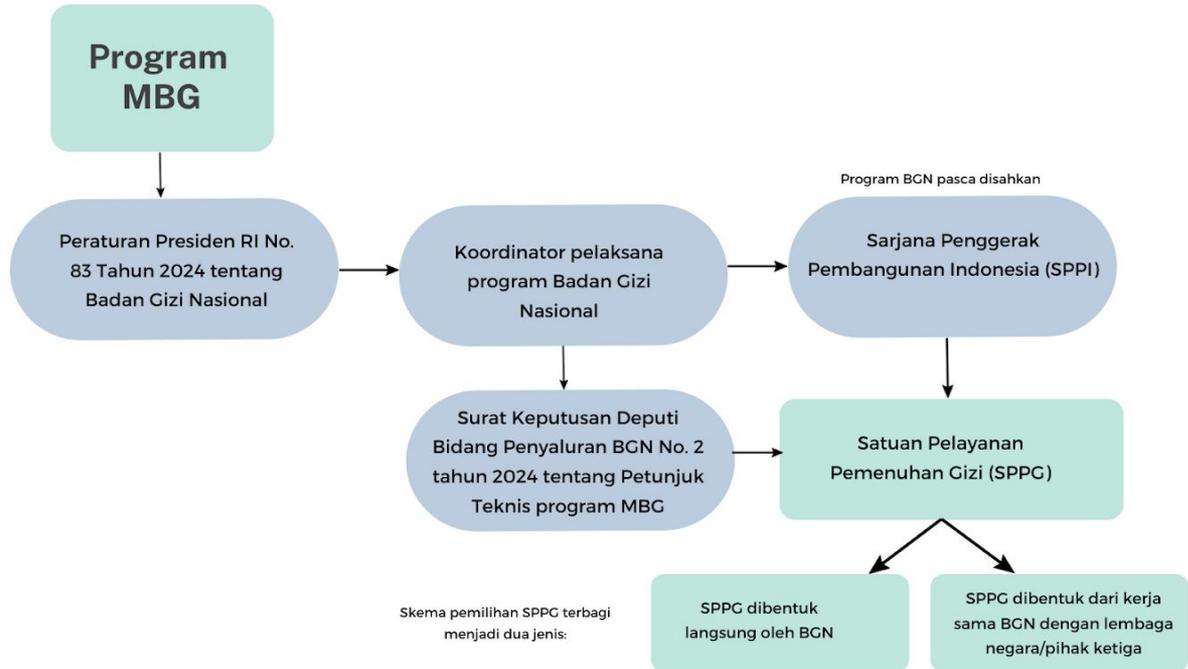
- Bansos memiliki daya tarik bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- Namun kali ini bukan dalam bentuk uang, pangan, atau subsidi melainkan makanan siap kunyah.

Pertanyaan:

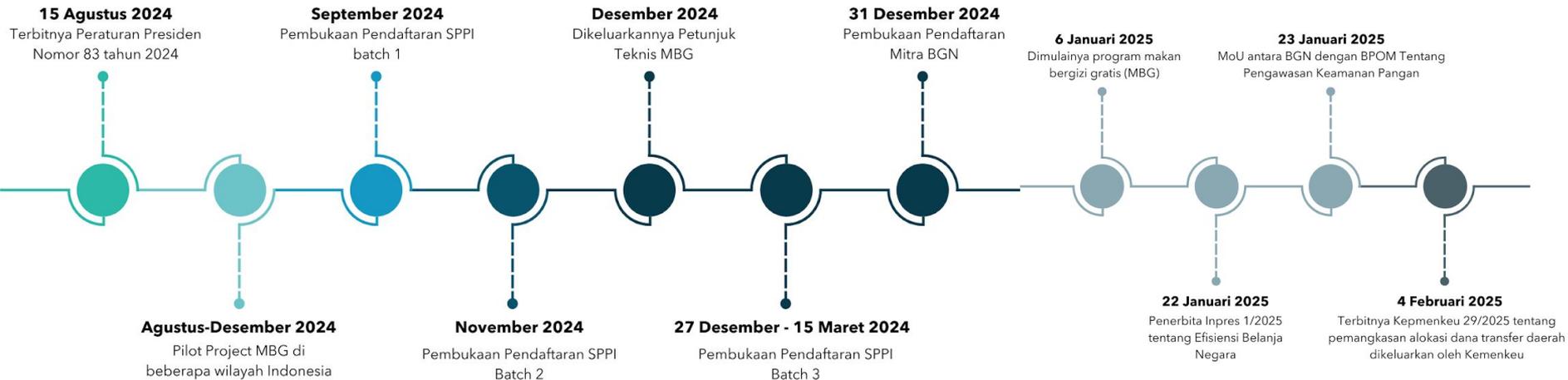
Mengapa muncul solusi MBG? Apa akar masalahnya?

Bagaimana evaluasi sepanjang 2 bulan MBG berjalan?

Alur Kebijakan Program MBG



Linimasa Kebijakan MBG



Mengenai BGN

- Badan Gizi Nasional (BGN) adalah koordinator pelaksana program Makan Bergizi Gratis.
- Tugas utama BGN:

Memastikan pemenuhan gizi nasional dengan menjalankan berbagai fungsi, antara lain:

- Koordinasi
- Perumusan, dan
- Penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran gizi, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia

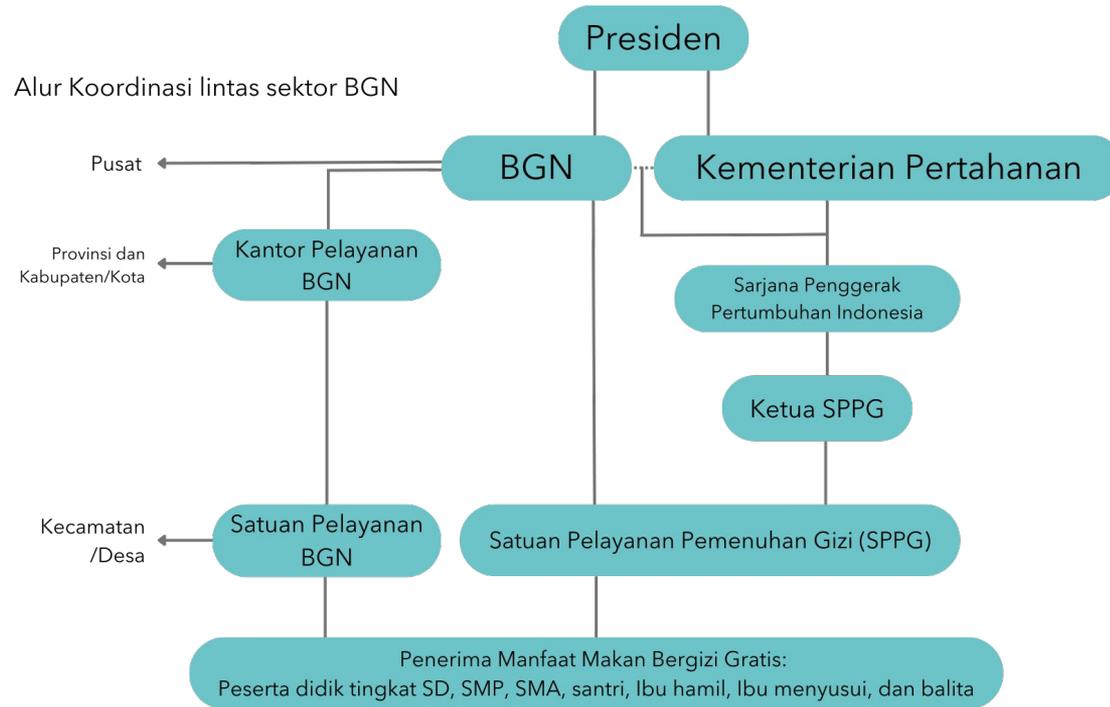
- BGN meluncurkan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
 - SPPI merupakan program di bawah Kementerian Pertahanan RI.
 - Pilot project sudah berjalan sejak Agustus, baru dikeluarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Penyaluran BGN Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program MBG pada Desember 2024.
 - Petunjuk teknis belum mengatur secara detail operasional MBG seperti standar kebersihan, keamanan pangan, pengumpulan bahan, pengemasan, suplai, hingga penyaluran makanan.
-

-
- Petunjuk teknis berisi skema pelaksanaan MBG dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
 - SPPG akan diawasi oleh SPPI, yang bertugas memastikan komposisi nilai gizi pada makanan yang disalurkan.
 - BGN sebagai *leading sector* memiliki fungsi koordinasi baik secara horizontal maupun vertikal, yang seharusnya dapat mengoptimalkan peran pemerintah daerah sebagai mitra strategis di lapangan.
 - Alih-alih memanfaatkan keberadaan pemerintah daerah, BGN bersama Kementerian Pertahanan membentuk SPPI untuk menghasilkan SPPG di berbagai wilayah sebagai pelaksana teknis.
 - Program MBG juga menunjukkan ketergantungan yang sangat besar pada BGN dan Kementerian Pertahanan. Contohnya BPOM yang baru dilibatkan pertengahan Januari.
-

Anggaran

- Pemotongan besar-besaran anggaran negara untuk membiayai MBG tidak dipikirkan matang.
 - Hasil pemotongan diproyeksi Rp306,6 triliun dan kebutuhan MBG per bulan Rp1 triliun, dengan Rp100 triliun diberikan pada BGN.
 - Biaya operasional BGN lebih besar daripada biaya yang perlu dikeluarkan untuk MBG. Tak heran karena pelaksana teknis program MBG adalah para SPPG yang berasal dari SPPI dengan pelatihan dari Kementerian Pertahanan.
 - BGN bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan mencetak SPPI yang hingga saat ini telah berjalan rekrutmen batch 3.
 - Tak sekedar rekrutmen, SPPI digembleng layaknya tentara dengan program akademi militer seperti latihan fisik, dengan menjalani berbagai seleksi berupa tes psikologi, kesehatan, dan mental ideologi.
 - Untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut tentu dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
-

Alur Koordinasi BGN



Bisnis Proses

- Ujung tombak dalam pelaksanaan program MBG ialah peranan penting dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
 - Skema SPPG terbagi menjadi dua jenis:
 1. SPPG yang dibentuk langsung oleh BGN
 2. SPPG yang dibentuk dari hasil kerja sama BGN dengan lembaga negara/pihak ketiga
 - Calon mitra yang akan membawahi SPPG perlu melakukan pendaftaran:
 - Pendaftaran akun mitra
 - Pengajuan calon lokasi titik dapur umum
 - Persiapan SPPG
 - Target: Januari-Februari sebanyak 500-937 SPPG, 5000 sampai Desember 2025.
 - Terhitung jumlah SPPG mulai dari Aceh sampai Papua Barat lebih dari 190 SPPG per Januari 2025 yang dipublikasi media. Ada 726 SPPG klaim Kepala BGN.
-

-
- Ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam pemilihan skema kemitraan menjadi salah satu masalah utama dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) program MBG.
 - Pemilihan SPPG di wilayah tertentu tidak jelas kriteria dan cara pemilihan yang digunakan. SPPG hanya diwajibkan lolos administrasi dan verifikasi lapangan tanpa memperhitungkan pengalaman, rekam jejak, dan prioritas pada Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).
 - Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena proses yang tidak transparan membuat SPPG yang lolos adalah SPPG yang terafiliasi dengan BGN, Kementerian Pertahanan, ataupun perusahaan besar yang memiliki bendera anak usaha dimana-mana.
 - Mengacu dari informasi pemerintah kepada media, dapat dilihat terdapat calon mitra yang memiliki wilayah sebaran lebih dari satu.
-

-
- Aspek pengadaan pasokan bahan pangan yang tidak terinformasi sedikit pun.
 - Hanya disebutkan bahwa ada rantai pasok tanpa terinfo tanggung jawab masing-masing stakeholders.
 - Pengadaan jasa ahli gizi untuk menghindari keracunan makanan yang dialami penerima manfaat juga perlu menjadi perhatian penting.
 - Kompleksnya masalah ini semakin menekankan bahwa tidak ada pembagian tugas yang jelas karena aturannya baru akan dirumuskan
-

Rekomendasi:

Kebijakan

Untuk mengatur tata kelola dan mekanisme pelaksanaan MBG secara komprehensif, seharusnya pemerintah mengeluarkan Perpres khusus yang membahas tentang MBG.

Anggaran

Kebijakan anggaran yang sangat prematur ditambah minimnya transparansi dan pengawasan membuka lebar celah korupsi.

Bisnis Proses

Praktik yang terjadi di lapangan justru menggambarkan lemahnya pengawasan BGN terhadap ancaman monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antar SPPG.
